ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAN DANA DESA PADA DESA-DESA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Suci Utami

NPM : 1705170302

Program Studi : Akuntansi

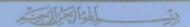
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

II. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah

Kosebitasi / : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

AKUNTABILITAS PENGELGEAAN DANA DESA PADA

DESA-DESA DEKECAMATAN PERCUBSEI TUAN

(A Lulys Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan

(MUHAMMAD FAHMI, SE.,

soc. Prof. Dr. Hj. MAYA SAME SE M.Si)

Pembimbing

(H. IHSAN RAMBE, SE., M.Si)

Painty Ujian

Ketua

Sekretari

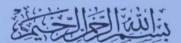
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap: SUCI UTAMI

N.P.M :1705170302 Program Studi: AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA DESA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(H. IHSAN RAMBE, S.E, M.Si)

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Dekan

akultas Ekonomi dan Bisnis UMBU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E, M.Si)

NURI, S.E., M.M., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Utami

NPM : 1705170302

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan

Percut Sei Tuan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat orang karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2021

Yang Membuat Pernyataan



ABSTRAK

Suci Utami. 1705170302. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. 2021. Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di 18 desa yang terdapat pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 72 orang yang masing-masing merupakan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan operator siskeudes dari 18 desa yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan diukur menggunakan skala Likert. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan Sofware komputer yaitu Statistcal Package For Social Science (SPSS 22). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi Aparatur Desa secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (2) Komitmen Organisasi secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (3) Penerapan Sistem Keuangan Desa secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (4) Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

Suci Utami. 1705170302. Analysis of Factors Affecting Accountability of Village Fund Management in Villages in Percut Sei Tuan District. 2021.

The purpose of this study is to determine the effect of Village Apparatus Competence, Organizational Commitment and Implementation of the Village Financial System on Village Fund Management Accountability in Villages in Percut Sei Tuan District. This type of research is quantitative research. This research was conducted in 18 villages in Percut Sei Tuan District. The population and sample in this study consisted of 72 people, each of which was the village head, village secretary, village treasurer and siskeudes operator from the 18 villages studied. Sources of data used in this study is primary data obtained by using a questionnaire and measured using a Likert scale. While the data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis method which was carried out with the help of computer software, namely the Statistical Package for Social Science (SPSS 22). The results in this study indicate that: (1) Village Apparatus Competence partially and significantly has no effect on Village Fund Management Accountability. (2) Organizational Commitment partially and significantly influences Village Fund Management Accountability. (3) The implementation of the Village Financial System partially and significantly affects the Accountability of Village Fund Management. (4) Village Apparatus Competence, Organizational Commitment and Implementation of the Village Financial System simultaneously and significantly affect the Accountability of Village Fund Management.

Keyword: Village Apparatus Competence, Organizational Commitment,

Implementation Village Financial System, Village Fund Management

Accountability

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan tidak lupa juga Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan" guna memenuhi kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya perhatian, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak hingga sampai selesainya laporan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk yang teristimewah yaitu kedua orangtua penulis Ayahanda Sudarto dan Ibunda Titin Sari Maya yang selalu menyayangi saya, memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Agussani, M.A.P Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak Dr. Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Bapak Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 6. Bapak Riva Ubar Harahap SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 7. Bapak H. Ihsan Rambe, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing penulis, memberikan arahan, ilmu, pemikiran dan waktunya kepada penulis.
- 8. Bapak Roni Parlindungan Sipahutar SE., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 10. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perihal administrasi.
- 11. Seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator Desa dan Kasi PMD di Kecamatan Percut Sei Tuan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia bekerjasama dan berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 12. Teman-teman seperjuangan penulis Dewi Sari Matanari, Marina Saskia Rangkuti yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
- 13. Tak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis dalam pembuatan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 2021

Penulis

Suci Utami 1705170302

DAFTAR ISI

	Halaman		
ABSTRAK	i		
ABSTRACT	ii		
KATA PENGANTA	Riii		
DAFTAR ISI	v		
DAFTAR GAMBAR	ix		
DAFTAR TABEL	X		
BAB I PENDAHULU	JAN1		
1.1 Latar F	Belakang Masalah1		
1.2 Identif	ikasi Masalah11		
1.3 Batasa	n Masalah12		
1.4 Rumus	an Masalah12		
1.5 Tujuan Penelitian13			
1.6 Manfa	at Penelitian13		
BAB II KAJIAN PUS	STAKA15		
2.1 Landas	san Teori15		
2.1.1	Pengelolaan Dana Desa		
	2.1.1.1 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa17		
2.1.2	Akuntabilitas		
	2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa22		
2.1.3	Kompetensi Aparatur Desa24		
	2.1.3.1 Indikator Kompeten Aparatur Desa26		
2.1.4	Komitmen Organisasi		
	2.1.4.1 Indikator Komitmen Organisasi28		
2.1.5	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)29		

		2.1.5.1 Pengawasan Aplikasi Siskeudes	30
		2.1.5.2 Proses Pengelolaan Keuangan Desa	33
		2.1.5.3 Kelebihan dan Fitur-Fitur Aplikasi Siskeudes	34
		2.1.5.4 Indikator Siskeudes	35
2.	2 Kerang	ka Berpikir Konseptual	35
2.	3 Hipote	sis	38
BAB III ME	TODE I	PENELITAN	39
3.	1 Jenis P	enelitian	39
3.	2 Definis	si Operasional Variabel	39
	3.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	39
	3.2.2	Kompetensi Aparatur Desa	40
	3.2.3	Komitmen Organisasi	40
	3.2.4	Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	40
3.	3 Tempa	t dan Waktu Penelitian	43
	3.3.1	Tempat Penelitian	43
	3.3.2	Waktu Penelitian	44
3.	4 Teknik	Pengambilan Sampel	44
	3.4.1	Populasi	44
	3.4.2	Sampel	45
3.	5 Teknik	Pengumpulan Data	45
3.	6 Teknik	Analisis Data	46
	3.6.1	Uji Kualitas Data	46
		3.6.1.1 Uji Validitas	46
		3.6.1.2 Uji Realibilitas	47
	3.6.2	Statistik Deskriptif	47
	3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda	48

	3.6.4	Uji Asumsi Klasik	48
		3.6.4.1 Uji Normalitas	48
		3.6.4.2 Uji Multikolonearitas	49
		3.6.4.3 Uji Heteroskesdatisitas	49
	3.6.5	Uji Hipotesis	50
		3.6.5.1 Uji T (Parsial)	50
		3.6.5.2 Uji F (Simultan)	50
		3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi	51
BAB IV	HASIL P	ENELITIAN	52
	4.1 Deskri	psi Data	52
	4.1.1	Gambaran Umum Objek	52
	4.1.2	Demografi Responden	54
	4.1.3	Distribusi Tanggapan Responden	56
	4.2 Uji Ku	alitas Data	62
	4.2.1	Uji Validitas	62
	4.2.2	Uji Reliabilitas	66
	4.3 Analisi	is Data	67
	4.3.1	Statistik Deskriptif	67
	4.3.2	Uji Asumsi Klasik	69
		4.3.2.1 Uji Normalitas	69
		4.3.2.2 Uji Multikolonearitas	70
		4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	71
	4.3.3	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	73
	4.3.4	Uji Hipotesis	74
		4.3.4.1 Uji T (Parsial)	74
		4.3.4.2 Uji F (Simultan)	76

	4.3.4.3 Koefisen Determinasi
4.4 Pemba	hasan78
4.4.1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4.4.2	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4.4.3	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa80
4.4.4	Pengaruh Kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
BAB V KESIMPU	JLAN DAN SARAN84
5.1 Kesim	pulan84
5.2 Saran	85
5.2.1	Bagi Desa85
5.2.2	Bagi Peneliti Selanjutnya85
5.3 Keterb	atasan Penelitian86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 4.1 Grafik Histogram	69
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot.	70
Gambar 4.3 Kerangka Heteroskedastisitas	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa Kecamatan Sunggal	2
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa	6
Tabel 1.3 Desa yang Terlambat Menyampaikan Dana Desa	7
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	41
Tabel 3.2 Daftar Nama Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan	43
Tabel 3.3 Waktu Penelitian	44
Tabel 3.4 Skor Penilaian Pada Kuesioner	46
Tabel 4.1 Daftar Desa dan Nama Kepala Desa	53
Tabel 4.2 Daftar Kuesioner Penelitian	54
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden	54
Tabel 4.4 Usia Responden	55
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Responden	55
Tabel 4.6 Lama Bekerja Responden	56
Tabel 4.7 Kriteria Jawaban Responden	56
Tabel 4.8 Skor Angket Kompetensi Aparatur Desa	57
Tabel 4.9 Skor Angket Komitmen Organisasi	58
Tabel 4.10 Skor Angket Penerapan Sistem Keuangan Desa	60
Tabel 4.11 Skor Angket Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	62
Tabel 4.12 Validitas Kompetensi Aparatur Desa	63
Tabel 4.13 Validitas Komitmen Organisasi	64
Tabel 4.14 Validitas Penerapan Sistem Keuangan Desa	65
Tabel 4.15 Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	65
Tabel 4.16 Uji Reliabilitas	66
Tabel 4.17 Statistik Deskriptif	67
Tabel 4.18 Uji Multikolonearitas	71

Tabel 4.19 Analisis Regresi Linear Berganda	73
Tabel 4.20 Uji T	75
Tabel 4.21 Uji F	76
Tabel 4.22 Koefisien Determinasi	77

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana desa muncul di awali dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya yaitu pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa. Kewenangan yang diberikan undang-undang ini menjadikan desa harus mampu melakukan secara mandiri dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Zulaifah, 2020). Dan tentunya dalam hal ini pemerintah desa tidak mengelola dana desa dalam jumlah sedikit, melainkan mengelola dana dalam jumlah banyak. Setiap desa akan mengelola anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap (Lembaran & Republik, 2014).

Salah satunya ini dirasakan oleh desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya data yang penulis dapatkan atas pembagian dana desa yang setiap tahunnya digelontorkan kepada desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membantu desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik seperti meningkatkan pembangunan, pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat desa, hingga akhirnya dapat membuat desa tersebut menjadi mandiri dan sejahtera masyarakatnya.

Berikut adalah berupa daftar besaran dana desa yang dikelola setiap desa di Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Dana Desa Kecamatan Percut Sei Tuan

NAMA DESA	TAHUN					
NAMA DESA		2018		2019		2020
Desa Amplas	Rp	707.857.000	Rp	407.143.000	Rp	824.132.000
Desa Bandar Khalipah	Rp	744.511.000	Rp	795.310.000	Rp	920.173.000
Desa Bandar Klippa	Rp	1.046.978.000	Rp	837.404.000	Rp	1.031.860.000
Desa Bandar Setia	Rp	723.377.000	Rp	600.695.000	Rp	846.202.000
Desa Cinta Damai	Rp	916.754.000	Rp	455.851.000	Rp	927.940.000
Desa Cinta Rakyat	Rp	709.600.000	Rp	546.493.000	Rp	825.626.000
Desa Kolam	Rp	726.903.000	Rp	596.841.000	Rp	863.166.000
Desa Laut Dendang	Rp	704.642.000	Rp	507.959.000	Rp	811.160.000
Desa Medan Estate	Rp	681.886.000	Rp	530.991.000	Rp	749.497.000
Desa Pematang Lalang	Rp	711.395.000	Rp	387.424.000	Rp	814.214.000
Desa Percut	Rp	1.135.043.000	Rp	903.338.000	Rp	1.631.287.000
Desa Saentis	Rp	811.372.000	Rp	789.995.000	Rp	1.007.971.000
Desa Sampali	Rp	744.624.000	Rp	871.397.000	Rp	862.515.000
Desa Sei Rotan	Rp	758.142.000	Rp	664.274.000	Rp	910.725.000
Desa Tanjung Rejo	Rp	934.687.000	Rp	687.806.000	Rp	1.241.034.000
Desa Tanjung Selamat	Rp	687.729.000	Rp	480.324.000	Rp	781.148.000
Desa Sambirejo Timur	Rp	702.110.000	Rp	588.912.000	Rp	802.832.000
Desa Tembung	Rp	772.458.000	Rp	800.297.000	Rp	898.880.000

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 desa-desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan telah menerima anggaran dana desa tiap tahunnya dan tentunya memiliki jumlah dana desa yang berbeda-beda tiap tahunnya yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah

penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Muhammad Arif, 2018). Oleh karena itu, pemerintah Desa dalam mengelola dana desa tetap harus menyesuaikannya dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku yaitu secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan penuh pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan serta mengutamakan kepetingan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Siklus Pengelolaan Keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan Dana Desa dituntut oleh adanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana salah satu pilarnya akuntabilitas (Pertanggungjawaban).

Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai tanpa adanya pilar dari (Good Governance) itu sendiri diantaranya adalah akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel adalah harapan dan keinginan bagi setiap organisasi pemerintahan. Baik itu ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah, hal ini dilakukan demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sehingga tidak akan menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan oleh pemerintah desa, demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang telah dikelola oleh permerintah, Akuntabilitas dapat menjadi kontrol terhadap segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, maka dari itu akuntabilitas sangat penting keberadaannya dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan fenomena prinsip akuntabilitas diatas, bahwa terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari adanya kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Kompetensi Aparatur yang mumpuni dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan sangat baik (Medianti, 2018). Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan terdapat ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Warisno., 2008), sehingga informasi yang diterima masyarakat nantinya akan menjadi tidak tepat dan tentunya dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan desa yang baik pemerintah desa terkait harusnya mempunyai sumber daya berkualitas yang tentunya di dukung dengan latarbelakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/seminar dan tentunya mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Sembiring, 2013).

Berkaitan dengan kondisi kompetensi aparatur desa, fenomena yang terjadi menunjukkan dibeberapa pemerintahan desa khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan ini mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbilang sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa dibeberapa desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kasus korupsi penyimpangan dana desa sebesar Rp 782 Juta pada tahun anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan yang berinisial CA. Kerugian negara atas kasus korupsi dana desa itu mencapai Rp 400 juta dan uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi (Merdeka.com, 2017).

Fenomena tentang kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan kualitas SDM yang masih kurang terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa seharusnya selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa (Lubis et al., 2020). Terlebih kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa menjadi hal yang perlu diperhatikan, aparatur desa yang belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan dana desa dikarenakan tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor kompetensi aparatur desa sering mengalami kesulitan atau membuat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Hal ini didukung dari adanya data mengenai Tingkat Pendidikan Aparatur Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan				
SMA	S1 EKONOMI (AKUNTANSI)	S1 LULUSAN LAIN		
35 Orang	2 Orang	27 Orang		

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan

Selain kompetensi, faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi (Mada et al., 2017). Menurut (Khimah, 2005) Komitmen organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut (Simanjuntak, 2005) menyatakan bahwa komitmen merupakan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah dipercayakan kepada seseorang. Komitmen Organisasi yang kuat akan memungkinkan semua anggota organisasi bisa meningkatkan sumber daya fisik, mental serta spiritual tambahan yang diperoleh. Oleh karena itu aparatur desa harus memiliki sikap bersedia mengerahkan segala upaya dalam melakukan pekerjaan sehingga pengelolaan desa dapat berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan komitmen organisasi jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa kebagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang diakibatkan oleh aparatur desa menandakan bahwa sikap etos kerja atau komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa masih dikatakan kurang. Hal ini bisa terlihat

dari adanya data mengenai beberapa desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Desa yang Terlambat Menyampaikan Laporan Dana Desa

Tahun	Jumlah
2018	5 Desa
2019	5 Desa
2020	4 Desa

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 terdapat 5 desa yang terlambat menyampaikan laporan mengenai dana desanya. Dan pada tahun 2020 masih terdapat 4 desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan dana desanya pada pihak Kecamatan Percut Sei Tuan. Dimana menurut Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan keterlambatan dalam penyampaian laporan dana desa ini terjadi dikarenakan aparatur desa yang kurang disiplin dalam melaporkan dana desanya. Bahkan menurutnya terdapat beberapa desa yang setiap tahunnya selalu terlambat dalam melaporkan dana desanya.

Dengan adanya hal tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri, jika terus terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai dana desa pada periode berjalan, maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan dalam peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga akan mengakibatkan terkendalanya pemerintah desa dalam hal

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi (Savitri, 2019).

(Kurnia, 2019) menjelaskan dalam hal pengelolaan dana desa harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dengan melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan diatasnya yaitu Bupati/Walikota dan masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan dana desa yaitu 1 (satu) bulan pada periode selanjutnya, pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk semester akhir, hal ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahu 2015 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu Penerapan Sistem Keuangan Desa. Penulis menjadikan Penerapan Sistem Keuangan Desa sebagai variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas setelah komitmen organisasi. Kementerian Dalam Negeri telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk mengembangkan sistem informasi keuangan desa. Hal ini dilakukan guna membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta sebagai penentu kinerja pemerintah di desa (Kiswanto & Fatmawati, 2019). Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa

secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa (Malahika et al., 2018). Selain itu, tujuan diterapkannya sistem keuangan desa ini adalah untuk memudahkan pemerintah desa sehingga tepat waktu dalam menyampaikan laporan mengenai keuangan desanya dan berharap setelah adanya siskeudes ini dapat tercapainya asas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Akan tetapi seiring dengan dijalankannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), tidak dipungkiri bahwa dalam penerapan aplikasi ini masih dikatakan belum optimal (Sulistyowati, 2020). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam (Purnama & Azizah, 2019) yang menyatakan bahwa siskeudes belum dapat dioptimalkan oleh aparatur desa dalam menyusun pelaporan desa. sebanyak 211 desa mengalami keterlambatan pencairan dana desa karena tidak lengkapnya bagian administrasi dari pelaporan pengelolaan keuangan desa yang disebabkan kurangnya pemahaman aparatur desa dalam menginput data mengenai laporan perencanaan Siskeudes. Operator desa yang menjalankan sistem keuangan desa sendiri bukanlah merupakan lulusan pada bidang ilmu informatika, sehingga membuat operator desa rentan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan sistem keuangan desa. Selain itu, pelatihan yang diberikan pada aparatur desa dalam penggunaan sistem keuangan desa dapat dikatakan sangat jarang dilakukan di tiap desa. Pelatihan terhadap Sistem Keuangan Desa hanya diberikan bagi operator desa yang bertugas sehingga para aparatur desa lainnya tidak memahami aplikasi Siskeudes tersebut dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kendala yang tentunya akan dihadapi oleh aparatur di tiap desa.

Hal ini didukung dari adanya data yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara terhadap beberapa aparatur desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan yang mayoritas mengatakan bahwa "pelatihan mengenai penggunan sistem keuangan desa sangat jarang dilakukan di tempat dimana mereka bekerja". Penerapan sistem keuangan desa masih memiliki kekurangan-kekurangan seperti halnya aplikasi ini sering mengalami *error* pada saat digunakan untuk penginputan data dan data tidak terinput dengan baik ataupun halaman *entri* tidak muncul, data anggaran dalam siskeudes hanya bisa dimasukkan saat sebelum dan sesudah perubahan anggaran sehingga menjadikan siskeudes sebagai aplikasi masih dikatakan kurang siap untuk dijadikan sebagai cadangan pemasukan data anggaran secara sementara yang bisa di *update* jika dibutuhkan, aplikasi siskeudes yang masih *offline* (belum terhubung dengan jaringan internet/*online*), bentuk versi siskeudes yang selalu mengalami perubahan tiap tahun.

Dari hasil pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan modifikasi terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Medianti, 2018) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan), dengan mengubah salah satu variabel yaitu Partisipasi Masyarakat menjadi variabel Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana penelitian (Medianti, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian (Nurkhasanah, 2019) yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Penelitian (Medianti, 2018) menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian (Widiawaty, 2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Julianto & Dewi, 2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian (Wahyudi, 2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa di Kecamatan Percut Sei Tuan
- Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban mengenai anggaran dana desa yang disebabkan masih rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

 Masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga menghambat aparatur desa dalam mengelola keuangan desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

1.3 Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dan guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian yang lebih terarah, maka penulis dalam penelitian ini hanya membahas mengenai Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Desa dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dari segi responeden penelitian, objek penelitian ini hanya menujukkan kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap
 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan?
- 2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan?
- 3. Apakah terdapat pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan?

4. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

- Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
 Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan
- Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
 Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan
- Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap
 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan
- Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menerapakan teori-teori yang telah didapatkan selama memperoleh pendidikan pada saat kuliah ditengah persoalan yang terjadi di masyarakat sekitar terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan

2. Bagi Desa

Sebagai bahan informasi dan masukan yang diharapakan dapat bermanfaat bagi desa khususnya mengenai kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi yang dapat memberikan wawasan dan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LandasanTeori

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Ardianti1 et al., 2017) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses rangkaian atas segala pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan serangkaian pekerjaan untuk mencapai berbagai tujuan. Terdapat beberapa definisi pengelolaan yang mengalami berbagai perbedaan-perbedaaan yang disebabkan oleh para ahli tersebut meninjau pengelolaan dari sudut yang berbeda. Tetapi jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi dari para ahli tersebut menganut pengertian dan tujuan yang sama pula.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Dana Desa meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan meraih masa depan yang lebih baik lagi dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan yaitu dengan melakukan berbagai persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini, jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 5 Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa mempunya tugas antara lain:

- a. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
 perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan
 APBDesa
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan
- e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

3. Pertanggungjawaban

Menurut (Taufik, 2017) istilah pertanggung jawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti, sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang paling penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengeloaan adalah suatu rangkaian proses untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dimana dalam rangkaian proses tersebut berintikan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan dalam upaya membantu untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

2.1.1.1 Asas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas ini diharapkan nantinya pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran dengan uraian sebagai berikut:

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengar tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas Akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dah hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dan unsur masyarakat desa
- d. Tertib dan displin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya
 Dimana asas-asas atau prinsip pengelolaan Dana Desa di atas perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, dengan tujuan agar dana desa tersebut dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis serta secara berkeadilan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keselurahan aktivitas/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan APBDesa
- 2) Laporan Realisasi Anggaran

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban seseorang ataupun organisasi dalam memberikan suatu pertanggung jawaban atas segala aktivitas/kegiatan yang telah dimandatkan padanya kepada pihak yang telah memberikan amanah dan tentunya berkewenangan dan memiliki hak dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Ihyaul Ulum, 2004) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara priodik.

Menurut (Mahmudi, 2013) mendefisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Menurut (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas bukan hanya sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal kepada pihak *principal*, tetapi juga pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Mahyani, 2017). Tuntunan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus terpenting karena akuntabilitas tersebut menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari setiap desa yaitu untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan berkeadilan mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan organisasi/lembaga sektor publik lebih mengutamakan pada pertanggungjawaban horizontal/eksternal (Horizontal Accountability) tidak hanya pada pertanggungjawaban vertikal/internal (Vertical Horizontal). Hingga akhirnya tuntutan yang kemudian muncul yaitu perlu dibuatnya laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Dengan terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam mengelola keuangan desa merupakan salah satu bentuk pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Mahmudi, 2011) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur akuntabilitas pengeloalaan dana desa terdiri atas :

- a. Kejujuran dan keterbukan informasi
- b. Kepatuhan dalam pelaporan
- c. Kesesuaian prosedur
- d. Kecukupan informasi
- e. Ketepatan penyampaian informasi

Menurut (Budiarto et al., 2020) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik atau keahlian dari seseorang yang memiliki kreativitas, ilmu dan keahlian dalam melakukan pekerjaan. Menurut beberapa ahli, kompetensi merupakan karakter yang dapat mendasari seseorang dalam mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Aparatur Desa yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan *skill* yang cukup akan bekerja tersendat-sendat sehingga dapat mengakibatkan pemborosan bahan, waktu serta tenaga.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dalam lingkungan. Seseorang akan menjadi lebih percaya pada sesuatu jika seseorang tersebut terlibat secara langsung dalam proses persiapan serta perencanaan tersebut. Maka dari itu masyarakat yang terlibat langsung dalam proses tata kelola dana desa dan proses pembangunan desa akan merasa lebih percaya pada akuntabilitas dana desa.

c. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang dalam organisasi guna mewujudkan akuntabilitas. Komitmen dalam organisasi juga adalah salah satu syarat penting dalam tata kelola dana desa karena merupakan pendorong seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang mendukung organisasi.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan semua tata cara, metode serta ketentuan yang terkoordinasi untuk melindungi aset, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan menaati kebijakan yang telah diatur dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa karena dalam setiap penyaluran dana desa seluruh pihak baik dari tingkat kabupaten hingga desa diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik sehingga penyelenggaraan dana desa dapat terorganisir secara maksimal.

e. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan suatu sistem keuangan desa yang dibentuk oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas dan transparan. Dengan adanya penerapan Siskeudes ini diharapkan nantinya aparatur desa dengan mudahnya dapat menjalankan siklus pengelolaan keuangan dana desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan dengan tujuan guna memudahkan dalam proses pengelolaan dana desa.

f. Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa adalah sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sehingga daikatakan bahwa perangkat desa merupakan aparatur desa yang berada di bawah pimpinan kepala desa. Sedangkan perangkat desa adalah salah satu unsur pemerintah desa. Peran dari perangkat desa ini diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang dimiliki desa secara tepat dan mudah

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut (Ferina, 2016) Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat terealisasi tanpa melibatkan sumber daya manusia.

Menurut (Makalalag et al., 2017) menyatakan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemerintah desa hendaknya harus memiliki sumber daya yang kompeten agar pengelolan keuangan desa dapat dilakasanan dengan baik. Kompetensi aparat desa bisa didapat melalui latar belakang yang memadai dan mengikuti pelatian terkhusus pada bidang bagian keuangan.

Selain itu, pengalaman di bidang keuangan juga diperlukan aparatur desa untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ferina & Lubis, 2016). Oleh karena itu, kompetensi aparat pemerintah menjadi suatu yang sangat penting agar tata kelola dana desa berjalan dengan baik (Widyatama et al., 2020).

Menurut (Wibowo, 2010) menyatakan bahwa Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu.

Menurut (Havesi, 2005) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakter dari seseorang yang mempunyai keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut (Moheriono, 2012) mengemukakan bahwa Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat

dilakukan dan dipertahankan oleh pada seseorang pada periode waktu tertentu.

Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan juga dengan teori Stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas.

2.1.3.1 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Menurut (Edison et al., 2016) menyatakan bahwa indikator dalam mengukur Kompetensi Aparatur Desa terdiri atas :

- a. Pengetahuan
- b. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
- c. Keahliaan teknis
- d. Kemampuan mencari solusi
- e. Inisiatif dalam bekerja
- f. Keramahan dan kesopanan

2.1.4 Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi mempunyai kaitan erat dengan akuntabilitas. beberapa para ahli menyatakan komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas.

Menurut (Cavoukian et al., 2010) dalam (Mada et al., 2017) berpendapat bahwa Komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi adalah salah satu aspek terpenting di dalam akuntabilitas. (Behnam dan MacLean, 2011) dalam (Mada et al., 2017) mengumukakan bahwa dorongan terhadap komitmen organisasi mampu mempengaruhi standar akuntabilitas. (Roberts, 2002) dalam (Mada et al., 2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi terhadap publik bila diilustrasikan dapat memberikan manfaat pada sistem akuntabilitas. (Brown dan Moore, 2017) dalam (Mada et al., 2017) menyatakan bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam akuntabilitas organisasi melalui komitmen untuk kerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

Menurut (Robbins & Judge, 2015) menyatakan bahwa Komitmen Organisasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen Organisasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menujang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi.

Menurut (Nugroho, 2018) menyatakan bahwa Komitmen organisasi merupakan identifikasi yang dilakukan individu dalam menyesuaikan kondisi dirinya dengan nilai-nilai dan tujuan yang terdapat dalam organisasi. (Sopiah, 2008) menyatakan bahwa Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi akan menghasilkan kinerja yang baik sedangkan komitmen yang lemah akan menurunkan kinerja organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi (Cavoukian et al., 2010)

2.1.4.1 Indikator Komitmen Organisasi

Menurut (Allen & Mayer, 1993) dalam (Eva Kris, 2009)mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen dalam komitmen organisasi, antara lain:

- a. Affective Commitment (Komitmen Afektif), yaitu terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional.
- b. *Continuance Commitment* (Komitmen Kontinyu), yaitu perasaan berat meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasinya di organisasi tersebut.
- c. *Normative Commitment* (Komitmen Normatif), yaitu perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang di dasarkan atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan karyawan.

2.1.5 Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Kewenangan yang diberikan undang-undang, desa harus mampu melakukan secara mandiri dalam pengelolaan dana desa, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Desa tidak mengelola dan kecil, melainkan saat ini mengelola dana besar, sehingga diperlukan kompetensi memadai dan juga integritas yang baik dalam mengelola dana tersebut guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparatur pemerintahan desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). (Lubis et al., 2020) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal mewujudkan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan dana desa, maka desa yang menerima dana desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Menurut (Ayu et al., 2017) menyatakan bahwa Aplikasi Siskeudes merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa.

Menurut (BPKP, 2016) menyatakan bahwa Aplikasi Siskeudes didesain untuk memenuhi kebutuhan Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Desa dengan memiliki keunggulan yaitu sesuai dengan regulasi yang berlaku, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi (*user friendly*), *built-in internal control*, kesinambungan dalam *maintenance*, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *User Friendly* sehingga memudahkan penggunaan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes (Puspasari & Purnama, 2018). Hal inilah yang tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Firdausy et al., 2019).

2.1.5.1 Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), dengan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan dari aplikasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

- Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi
 UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.
- Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

b. Ruang Lingkup

Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya. Tahp pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa dapat di identifikasi titik-titik kritis di tingkat pemerintahan maupun dalam proses pengelolaan keuanganna sebagai berikut:

1. Tingkat Pemerintahan:

a) Pemerintahan Pusat:

Tugas Pemerinta Pusat

- Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan.
- 2. Sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian

 Peraturan Pelaksanaan yang belum mendukung, misal perpajakan dan PBJ

b) Pemerintah Provinsi:

Tugas Pemerintah Provinsi:

- 1. Pembinaan dan Pengawasan
- 2. Fasilitasi Pendampingan
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota:

Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Penghitungan alokasi: Dana Desa (APBN),
 Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) dan Bagi Hasil
 Retribusi/Pajak Daerah
- SDM (Kecamatan, inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
- 3. Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa
- d) Pemerintah Desa

Tugas pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- DM Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD)
- 2. Sarana dan Prasarana Desa
- 3. Kebijakan tingkat Desa

3.1.4.2 Proses Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan:

Perencanaan terdiri dari:

- Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementeria/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT.
- 3) Kualitas RKP Desa
- b. Penganggaran:

Penganggaran terdiri dari:

- 1) Penyusunan APBDesa
- 2) Harmonisasi Kepala Desa & BPD
- 3) Evaluasi APBDesa oleh Kecamatan
- c. Pelaksanaan:

Pelaksanaan terdiri dari:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Kewajiban Perpajakan
- 3) Kewenangan Kepala Desa yang besar
- d. Penatausahaan

Penatausahaan terdiri dari:

- 1) Administrasi pembukuan
- 2) Cara peng-SPJ-an
- 3) Pencatatan kekayaan desa

- 4) Konsep belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban:

Pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Jumlah laporan yang harus dibuat
- 2) Standar Pelaporan
- f. Pengawasan:

Pengawasan terdiri dari:

- 1) Efektifitas Pengawasan
- 2) Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota

2.1.4.3 Kelebihan dan Fitur-Fitur Aplikasi Sitem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku
- b. Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa
- c. Kemudahan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa
- f. Kelembagaan maintenance karena merupakan aplikasi resmi pemerintah.
- g. Aplikasi dapat di integrasikan dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN milik Kemenkeu dan SIPEDE milik Kemendesa PDTT

2.1.4.4 Indikator Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Indikator dalam mengukur sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebagai berikut:

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan
- c. Ketaatan terhadap peraturan

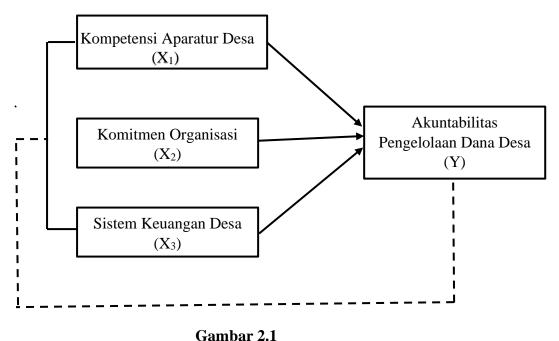
2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian serta menjelaskan maksud dan arah dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini hal yang ingin diteliti adalah untuk mengetahui apakah Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desadesa yang ada pada Kecamatan Percut Sei Tuan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka di perlukannya pengoptimalan dari setiap aspek yang mendukung dalam pengelolaan dana desa, termasuk pengoptimalan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa, komitmen yang dimiliki aparatur desa dan sistem pengelolaan keuangan yang digunakan oleh setiap desa. Kompetensi Aparatur Desa yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa serta mampu menerapkannya dengan baik pula, sehingga pengelolaan dana desa menjadi

semakin akuntabel. Dikuti dengan komitmen organisasi, aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sehingga akan mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara akuntabel. Aparatur desa dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa juga harus didukung dengan adanya peningkatan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi siskeudes diterapkan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga nantinya memudahkan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- Tersapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- 3. Terdapat pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- 4. Terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2018) adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrument penelitian dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk kewajiban aparatur desa dalam memberi pertanggung jawaban atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak/wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Indikator variabel adalah sebagai berikut: 1) Kejujuran dan keterbukaan informasi, 2) Kepatuhan dalam pelaporan, 3) Kesesuaian prosedur, 4) Kecukupan informasi, 5) Ketepatan penyampaian laporan

3.2.2 Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Kompetensi merupakan suatu karakter seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melakukan pekerjaan (Havesi, 2005). Menurut beberapa ahli, kompetensi merupakan karakteristik yang dapat mendasari seseorang dalam mencapai kinerja tinggi atas pekerjaannya. Aparatur desa yang tidak mempunyai ilmu yang cukup akan bekerja tersendat-sendat sehingga dapat menyebabkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan desa. Indikator variabel adalah sebagai berikut: 1) Pengetahuan, 2) Kemampuan dan meningkatkan pengetahuan, 3) Keahlian Teknis, 4) Kemampuan mencari solusi, 5) Inisiatif dalam bekerja, 6) Keramahan dan kesopanan

3.2.3 Komitmen Organisasi (X₂)

Komitmen organisasi adalah kesanggupan dalam bertanggungjawab pada sesuatu yang telah dipercayakan pada seseorang (Zoraya, 2020). Komitmen Organisasi memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Terdapat beberapa para ahli menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Indikator variabel adalah sebagai berikut: 1) Komitmen Afektif, 2) Komitmen Kontinyu, 3) Komitmen Normative

3.2.4 Penerapan Sistem Keuangan Desa (X₃)

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan bentuk penerapan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah Desa (BPKP, 2016). Indikator variabel adalah sebagai berikut: 1) Integritas Keuangan, 2) Pengungkapan, 3) Ketaatan Terhadap Peraturan

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
			Pengukuran
Akuntabilitas	Akuntabilitas Pengelolaan	Kejujuran dan	Skala <i>Likert</i>
Pengelolaan	Dana Desa merupakan	keterbukaan	1-5
Dana Desa	bentuk kewajiban aparatur	informasi.	
(Y)	desa terkait dalam	Kepatuhan	
	memberi pertanggung	dalam	
	jawaban atas segala	pelaporan.	
	kegiatan yang meliputi	Kesesuaian	
	perencanaan, pelaksanaan,	prosedur.	
	penatausahaan, pelaporan	Kecukupan	
	hingga	informasi.	
	pertanggungjawaban	Ketepatan	
	mengenai keuangan desa	penyampaian	
	(Permendagri Nomor 113	laporan.	
	Tahun 2014)		
Kompetensi	Kompetensi merupakan	Pengetahuan.	Skala <i>Likert</i>
Aparatur	suatu karakter seseorang	Kemampuan	1-5
Desa (X ₁)	yang memiliki	untuk	
	keterampilan (skill),	meningkatkan	
	pengetahuan (knowledge),	kemampuan.	
	dan kemampuan (ability)	Keahlian	
	dalam melakukan	teknis.	
	pekerjaan (Havesi, 2005).		

		Kemampuan	
		mencari solusi	
		Inisiatif dalam	
		bekerja	
		Keramahan	
		dan kesopanan	
Komitmen	Komitmen organisasi	Komitmen	Skala <i>Likert</i>
Organisasi	adalah kondisi dimana	afektif.	1-5
(X_2)	seorang pegawai memihak	Komitmen	
	organisasi tertentu serta	kontinyu.	
	tujuan-tujuan dan	Komitmen	
	keinginannya untuk	normatif.	
	mempertahankan		
	keanggotaan dalam		
	organisasi tersebut		
	(Robbins & Judge, 2015)		
Penerapan	Sistem Keuangan Desa	Integritas	Skala <i>Likert</i>
Sistem	(Siskeudes) merupakan	keuangan.	1-5
Keuangan	suatu aplikasi yang	Pengungkapan.	
Desa	dibentuk oleh Badan	Ketaatan	
(Siskeudes)	Pengawasan Keuangan	terhadap	
(X_3)	dan Pembangunan	peraturan.	
	(BPKP) dengan tujuan		
	untuk meningkatkan		
	kualitas tata kelola		
	keuangan pemerintah		
	Desa (BPKP, 2016)		
		l	

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berikut adalah daftar nama-nama desa yang terdapat pada Kecamatan Percut Sei Tuan.

Tabel 3.2 Daftar Nama Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Nama Desa
1	Desa Amplas
2	Desa Bandar Khalipah
3	Desa Bandar Klippa
4	Desa Bandar Setia
5	Desa Cinta Damai
6	Desa Cinta Rakyat
7	Desa Kolam
8	Desa Laut Dendang
9	Desa Medan Estate
10	Desa Pematang Lalang
11	Desa Percut
12	Desa Saentis
13	Desa Sampali
14	Desa Sei Rotan
15	Desa Tanjung Rejo
16	Desa Tanjung Selamat
17	Desa Sambirejo Timur
18	Desa Tembung

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penyusunan proposal ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai. Untuk secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tebel 3.3 Rencana Penyusunan Proposal

No	Jenis Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1	Pra Riset									
2	Pengajuan Judul									
3	Penulisan									
	Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Riset									
6	Penulisan Skripsi									
7	Meja Hijau									

Sumber: Panduan Penyusunan Skripsi UMSU 2021

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2012) Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 10 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dengan istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Alasan penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi kecil, maka sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh jumlah populasi untuk digunakan sebagai responden sebanyak 72 orang dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan operator sistem keuangan desa

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh berdasarkan Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada aparatur desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah berisi pertanyaan dan nantinya setiap jawaban dari Aparatur Desa akan di ukur dengan Skala Likert. Menurut

(Sugiyono, 2009) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat serta persepsi seseorang ataupun sekelompok orang mengenai fenomena sosisal. Penulis menggunakan penilaian kuesioner untuk setiap jawaban dengan bobot dari kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skor Penilaian Pada Kuesioner

Bobot	Kategori
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas Data dilakukan guna mengetahui data dari pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner harus dibuang atau digantikan dengan pernyataan lain karena dianggap tidak relevan (Ghozali, 2013). Uji signifikasi dilakukan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji validitas butir angket adalah:

- a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka variabel tersebut
 valid
- b. Jika r hitung tidak positif serta r hitung < r tabel maka variabel tersebut tidak valid

Jika hasil menunjukkan nilai yang signifikan maka masing-masing pertanyaan adalah valid.

3.6.1.2 Uji Reabilitas Data

Uji Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan realibel atau dapat diandalkan jika jawaban dari responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut stabil dari waktu ke waktu (Gozali, 2013)

Dala pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunaka lebih besar dari 0,60. Menurut (Ghozali, 2013) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*>0,60

3.6.2 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) uji statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi dan perhitungan presentase.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regeresi Linear Berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model persamaan regresi linear berganda dalam peneletian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Dimana : Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

 $B_1, B_2 \& B_3 = \text{Koefisien Regresi}$

 X_1 = Kompetensi Aparatur Desa

 X_2 = Komitmen Organisasi

X₃ = Penerapan Sistem Keuangan Desa

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah uji yang digunakan untuk persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda menggunakan Sofware komputer yaitu Statistcal Package For Social Science (SPSS 22)

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian normal atau tidak. (Ghozali, 2013) menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan uji statistik untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi atau tidak. Uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan cara

membandingkan probabilitas dengan tingkat nilai signifikansi tertentu sebagai berikut:

- a. Nilai Signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka distribusi adalah tidak
 normal
- b. Nilai Signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka distribusi adalah normal

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji variabel-variabel independen. Menurut (Ghozali, 2013) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* harus $\geq 0,1$ atau sama dengan nilai VIF-nya dan dari masing-masing variabel adalah ≤ 10 .

3.6.4.3 Uji Heterokesdastisitas

Uji Heterokesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan kepengamatan lain (Ghozali, 2013). Dasar analisis:

 a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heterokesdastisitas b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik tidak menyebar diatas
 dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
 heterokesdastisitas

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji t (Parsial)

Uji Parsial atau Uji t digunakan untuk membuktikan bahwa hipotesis awal tentang pengaruh kompetensi aparatur desa (X_1) , Komitmen Organisasi (X_2) dan Sistem Keuangan Desa (X_3) , sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa (Y) sebagai variabel dependen.

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada alpha = 0.05
- b. Ha ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada alpha = 0.05

3.6.5.2 Uji F (Simultan)

Uji Simultan atau uji F digunakan untuk menguji keterikatan pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Variabel independen yaitu terdiri atas kompetensi aparatur desa (X_1) , Komitmen Organisasi (X_2) dan sistem keuangan desa (X_3) . Variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. F hitung < F tabel, maka Ho diterima Ha di tolak pada Alpha = 0,05
- b. F hitung > F tabel, maka Ho ditolak Ha di terima pada Alpha = 0.05

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 sampai 1. Semakin kecil nilai R², maka semakin terbatas kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel determinannya. Penelitian ini juga menggunakan adjusted R Square (Adj R²) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada 1 variabel independen maka menggunakan R Square (R²) dalam menjelaskan pengaruh variabel independennya (Ghozali, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Landasan Teori

4.1.1 Gambaran Umum Objek

Objek dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolan dana yang terdiri atas Kepala Desa/Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada pada Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah desa sebanyak 18 Desa. Penelitian ini mempunyai tujuan guna untuk melihat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Dimana data yang penulis peroleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada para responden.

Kecamatan Percut Sei Tuan berada di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan Luas Wilayah 190,79 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 462.936 penduduk. Kecamatan Percut Sei Tuan saat ini dipimpin oleh Bapak Ismail., SSTP., MSP yang menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki 18 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Nama Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa
1	Desa Amplas	Edi Purwanto
2	Desa Bandar Khalipah	Suparyo, SH
3	Desa Bandar Klippa	Suripno, SH, MH
4	Desa Bandar Setia	Sugiato
5	Desa Cinta Damai	J. Josevina Tambunan, S.Pd
6	Desa Cinta Rakyat	Suhendro, ST
7	Desa Kolam	Jupri Purwanto
8	Desa Laut Dendang	Suwardi
9	Desa Medan Estate	Rusmiati
10	Desa Pematang Lalang	Anjur Silitonga
11	Desa Percut	Asyhari Syah S.AG
12	Desa Saentis	Asmawito, S.Sos
13	Desa Sampali	Muhammad Ruslan
14	Desa Sei Rotan	Suwandi, MS
15	Desa Tanjung Rejo	Selamet
16	Desa Tanjung Selamat	Herman
17	Desa Sambirejo Timur	Joko Susilo, Amd
18	Desa Tembung	Misman

Sumber: Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan

Jumlah kuesioner yang dibagikan pada setiap desa berjumlah 4 kuesioner. Dari total kuesioner yang telah dibagikan ke masing-masing desa yaitu sebanyak 72 kuesioner, jumlah kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan sebanyak 64 kuesioner dan kuesioner yang tidak kembali berjumlah 8 kuesioner.

Tabel 4.2

Daftar Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang dibagikan	72
Kuesioner tidak valid	(8)
Kuesioner terisi dan layak untuk di input	64

Sumber: Data diolah tahun 2021

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah aparatur desa yang terdiri atas Kepala Desa/Sekretaris desa, Bendahara Desa, Operator Sistem Keuangan Desa.

4.1.2 Demografi Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap aparatur desa yang ada di desa-desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Dengan jumlah responden sebanyak 64 orang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 64 responden dalam penelitian ini, maka diperoleh demografi responden sebagai berikut:

Tebel 4.3 Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	34	53,1	53,1	53,1
	Perempuan	30	46,9	46,9	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa terdapat 34 responden atau 53,1% responden yang berjenis kelamin laki laki dan terdapat 30 responden atau 46,9% responden perempuan

Tabel 4.4 Usia Responden

				Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	21-25 Tahun	4	6,3	6,3	6,3
	26-30 Tahun	10	15,6	15,6	21,9
	>30 Tahun	50	78,1	78,1	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia 21-25 tahun terdiri dari 4 responden atau 6,3%, responden yang berusia 26-30 tahun terdiri dari 10 responden atau 15,6% dan responden yang berusia >30 tahun terdiri dari 50 responden atau 78,1%, sehingga total keseluruhan responden adalah 64 responden dengan tingkat persentase sebesar 100%

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Responden

		1	,	Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	SMA	35	54,7	54,7	54,7
	D3 (DIPLOMA)	4	6,3	6,3	60,9
	S1	24	37,5	37,5	98,4
	S2	1	1,6	1,6	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah SPSS tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu berpendidikan SMA sebanyak 35 orang atau 54,7%, responden yang berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 4 orang atau 6,3%, responden yang berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang atau 37,5% dan responden yang berpendidikan Magister (S2) sebanyak 1 orang atau 1,6%

Tabel 4.6 Lama Bekerja Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 Tahun	8	12,5	12,5	12,5
	5-10 Tahun	33	51,6	51,6	64,1
	>10 Tahun	23	35,9	35,9	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah SPSS tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa terdapat 8 responden atau 12,5% responden yang bekerja <5 tahun, terdapat 33 responden atau 51,6% responden yang bekerja 5-10 tahun dan terdapat 23 responden atau 35,9% responden yang bekerja >10 tahun

4.1.3 Distribusi Tanggapan Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap aparatur desa yang ada di desa-desa pada Kecamatan Percut Sei Tuan. Dengan jumlah responden sebanyak 64 orang. Berikut akan dijelaskan hasil penelitian dari data kuesioner yang sudah dibagikan kepada responden, namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis penulis akan menjabarkan terlebih dahulu persentase dari jawaban responden untuk setiap kuesioner yang telah dibagikan, penulis telah menetapkan bahwa jawaban dari masing-masing reponden akan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai dengan 5.

Tabel 4.7 Kriteria Jawaban Responden

Kriteria	Bobot	Keterangan
SS	5	Sangat Setuju
S	4	Setuju
N	3	Netral
TS	2	Tidak Setuju
STS	1	Sangat Tidak Setuju

 $\label{lem:tabel 4.8} \textbf{Skor Angket X_1 Kompetensi Aparatur Desa}$

NIa	ITEM PERNYATAAN	SS		S		N		TS		STS		TOTAL	
No	HEMPERNIATAAN	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Aparatur desa memahami Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai dana desa	29	45	27	42	8	13	0	0	0	0	64	100
2	Siklus Akuntansi selalu dimengerti oleh setiap perangkat desa	24	37	28	44	12	19	0	0	0	0	64	100
3	Pengetahuan mengenai teknologi informasi mampu menunjang kemampuan setiap aparatur desa dalam melakukan pekerjaan	31	48	23	36	10	16	0	0	0	0	64	100
4	Aparatur desa mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan baik	27	42	30	47	7	11	0	0	0	0	64	100
5	Aparatur desa selalu mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan desa	21	33	37	57	5	8	1	2	0	0	64	100
6	Aparatur desa selalu mampu dalam mencari solusi apabila terjadi suatu permasalahan dalam pengelolaan dana desa	26	41	30	47	8	12	0	0	0	0	64	100
7	Inisiatif aparatur desa dalam mengelola keuangan desa selalu dibutuhkan	23	36	32	50	7	11	2	3	0	0	64	100

8	Aparatur desa memiliki rasa												
	tanggungjawab atas segala												
	pekerjaan yang diamanahkan	34	53	23	36	7	11	0	0	0	0	64	100
	padanya												
9	Aparatur desa selalu bekerja												
	dengan mengedepankan etika	28	44	24	37	9	14	3	5	0	0	64	100
	dan kode etik sebagai seorang												
	pegawai												

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kompetensi Aparatur Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan baik, terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aparatur Desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki kompetensi yang baik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan oleh pengetahuan aparatur desa mengenai akuntansi dapat dikatakan baik dan aparatur desa memiliki pengetahuan mengenai perundang-undangan desa dengan baik.

Tabel 4.9
Skor Angket X₂ (Komitmen Organisasi)

No	ITEM PERNYATAAN	SS		S		N		TS		STS		TOTAL	
140		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Aparatur desa selalu merasa	23	36	31	49	6	9	4	6	0	0	64	100
	menjadi bagian dari organisasi												
2	Aparatur desa selalu dapat menemukan antara kesamaan nilai-nilai yang ada di diri	26	41	33	51	5	8	0	0	0	0	64	100
	sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada organisasi ditempat aparatur desa bekerja												
3	Aparatur desa selalu merasa permasalahan yang terjadi dalam organisasi juga menjadi	34	53	21	33	4	6	5	8	0	0	64	100

	permasalahan bagi dirinya sendiri												
4	Aparatur desa selalu memiliki kesempatan dalam membangun karir pada pemerintahan desa	26	41	35	55	3	5	0	0	0	0	64	100
5	Aparatur desa selalu memiliki peluang dalam meningkatkan prestasi serta selalu dapat menunjukkan sikap yang positif dalam pemerintahan desa	31	48	28	44	5	8	0	0	0	0	64	100
6	Kantor desa selalu layak mendapatkan kesetiaan dari setiap perangkat desa	30	47	32	50	2	3	0	0	0	0	64	100
7	Aparatur desa selalu merasa belum banyak memberikan kontribusi dalam organisasi	25	39	36	56	3	5	0	0	0	0	64	100

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Komiten Organisasi di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan baik, terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab Setuju dan Sangat Setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aparatur Desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki komitmen yang baik dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa merasa kantor desa layak mendapatkan kesetiaan dari setiap perangkat desa serta rasa memiliki yang ada dalam diri aparatur desa merupakan wujud kesetiaan/pengabdian aparatur desa terhadap kantor desa dalam mengelola dana desa

Tabel 4.10 Skor Angket X3 (Penerapan Sistem Keuangan Desa)

M		S	S	S	5	ì	1	Т	S	ST	rs .	ТО	TAL
No	ITEM PERNYATAAN	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Sistem keuangan desa dapat mengurangi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan desa	34	53	27	42	3	5	0	0	0	0	64	100
2	Sistem keuangan desa dapat meningkatkan keterbukaan dalam laporan keuangan desa	29	45	31	49	2	3	2	3	0	0	64	100
3	Sistem Keuangan Desa dapat menghasilkan bukti-bukti seperti halnya (faktur, nota dan lain sebagainya) dalam laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas	22	34	38	59	3	5	1	2	0	0	64	100
4	Sistem keuangan desa dapat memudahkan aparatur desa dalam proses pengklasifikasian setiap transaksi dibanding menggunakan sistem manual	35	55	26	40	3	5	0	0	0	0	64	100
5	Sistem keuangan desa selalu dapat mempermudah dalam penyampaian informasi mengenai laporan keuangan desa, laporan realisasi anggaran dana desa, neraca dan lain sebagainya dalam website resmi	34	53	30	47	0	0	0	0	0	0	64	100
6	Sistem keuangan desa merupakan sistem yang dapat menghasilkan format laporan yang akurat, relevan dan terbaru (<i>Up To Date</i>)	28	44	32	50	4	6	0	0	0	0	64	100

7	Sistem keuangan desa merupakan sistem yang selalu dapat menghasilkan <i>output</i> laporan keuangan desa yang mudah dimengerti oleh publik	26	41	38	59	0	0	0	0	0	0	64	100
8	Sistem keuangan desa dapat meningkatkan ketaatan terhadap belanja desa berdasarkan sumber dana	36	56	25	39	3	5	0	0	0	0	64	100
9	Sistem keuangan desa dapat meningkatkan ketaatan terhadap pembayaran pajak sesuai dengan ketetapan pajak	27	42	31	49	2	3	4	6	0	0	64	100
10	Sistem keuangan desa dapat menyajikan laporan keuangan desa dengan secara wajar yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang berlaku	37	58	25	39	2	3	0	0	0	0	64	100

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan baik, terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa dapat mengelola keuangan desa dengan penuh pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan diterapkanya Sistem Keuangan Desa dapat memberikan informasi kepada publik secara terbuka dan penuh pertanggung jawaban, sistem keuangan desa selalu dapat menghasilkan *output* laporan keuangan desa yang mudah dimengerti oleh publik sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan desa.

Tabel 4.11 Skor Angket Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)

No	ITEM PERNYATAAN		S	S	5	1	N	T	S	ST	S	ТОТ	'AL
NO	HEMPERNIATAAN	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pengelolaan keuangan desa telah disusun sesuai dengan ketetapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	24	38	38	59	0	0	2	3	0	0	64	100
2	Dalam Pengelolaan Keuangan Desa telah disajikan dengan penuh pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dan penuh keterbukaan (Transparansi)	31	48	29	45	3	5	1	2	0	0	64	100
3	Realisasi dana desa telah di informasikan melalui pembuatan spanduk maupun baliho yang ada di kantor desa setempat	19	30	40	62	3	5	2	3	0	0	64	100
4	Aparatur desa selalu tepat waktu dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa	27	42	32	50	5	8	0	0	0	0	64	100
5	Dalam menyerahkan/menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa selalu dilakukan dengan tepat waktu dan secara menyeluruh	43	67	18	28	3	5	0	0	0	0	64	100
6	Dana desa yang digunakan selalu dicatat dengan penuh pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dan penuh keterbukaan (Transparansi)	24	38	36	56	4	6	0	0	0	0	64	100

7	Penyusunan Laporan												
	pertanggungjawaban yang												
	memuat realisasi pendapatan,	18	28	42	66	2	3	2	3	0	0	64	100
	belanja desa dan pembiayaan												
	desa secara lengkap												
8	Laporan keuangan yang												
	disajikan memuat dan	32	50	26	40	5	8	1	2	0	0	64	100
	mengungkapkan informasi												
	yang memadai												
9	Informasi mengenai												
	penyaluran dan desa selalu bisa	23	36	33	51	5	8	3	5	0	0	64	100
	didapat setiap waktu												

Sumber: Data diolah Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dikatakan sangat baik, hal ini terlihat dari jawaban responden pada setiap kuesioner yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyampaian dan penyusunan keuangan desa sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur desa yang menjalankan dan yang melakukan pengelolaan keuangan desa sudah bersikap jujur dan penuh keterbukaan kepada publik atas pelaporan dana desa yang dibuat sehingga dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh yang satu dengan yang lainnya antara variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) yang telah didapat dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12 Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X1)

N=64

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,483	0,246	Valid
2	0,582	0,246	Valid
3	0,455	0,246	Valid
4	0,487	0,246	Valid
5	0,534	0,246	Valid
6	0,436	0,246	Valid
7	0,504	0,246	Valid
8	0,519	0,246	Valid
9	0,683	0,246	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar (0,246) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator Kompetensi Aparatur Desa (X1) yaitu valid dan layak untuk di uji.

Tabel 4.13 Validitas Komitmen Organisasi (X1)

N=64

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,636	0,246	Valid
2	0,448	0,246	Valid
3	0,683	0,246	Valid
4	0,322	0,246	Valid
5	0,632	0,246	Valid
6	0,420	0,246	Valid
7	0,666	0,246	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar (0,246) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator Komitmen Organisasi (X2) yaitu valid dan layak untuk di uji.

Tabel 4.14
Validitas Penerapan Siskeudes (X1)

N=64

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	1 0,374		Valid
2	2 0,316		Valid
3	0,573	0,246	Valid
4	0,613	0,246	Valid
5	0,543	0,246	Valid
6	0,543	0,246	Valid
7	0,560	0,246	Valid
8	8 0,644		Valid
9	9 0,315		Valid
10	10 0,546		Valid

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar (0,246) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) yaitu valid dan layak untuk di uji.

Tabel 4.15 Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1)

N=64

Pernyataan	Pernyataan r Hitung		Keterangan
1	1 0,358		Valid
2	2 0,405		Valid
3	0,507	0,246	Valid
4	0,504	0,246	Valid
5	0,509	0,246	Valid
6	0,450	0,246	Valid
7	0,638	0,246	Valid
8 0,569		0,246	Valid
9 0,483		0,246	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar (0,246) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua

item dalam indikator Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) yaitu valid dan layak untuk di uji.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari responden konsisten atau stabil. Berikut hasil uji reliabilitas variabel dalam penelitian ini. Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka didapat hasil Cronbach's Alpha yang akan disajikan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batasan	Keterangan
KAD (X1)	0,668	0,600	Realibel
KO (X2)	0,613	0,600	Realibel
P.SKD (X3)	0,636	0,600	Realibel
APDD (Y)	0,616	0,600	Realibel

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan mengenai Kompetensi Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam kuesioner dikatakan Reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach's Alpha masing-masing sebesar 0,065 > 0,600 : 0,602 > 0,600 : 0,693 > 0,600 : 0,604 > 0,600 hal ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,600 yang berarti semua pernyataan yang berhubungan dengan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, penerapan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan baik dan reliabel.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dijelaskan pada sub-sub sebelumnya. Dimana data-data yang dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu. Berikut adalah data perhitungan data statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KAD (X1)	64	32	45	39,73	3,497
KO (X2)	64	26	35	32,06	2,544
P.SKD (X3)	64	40	50	46,92	2,528
APDD (Y)	64	37	45	42,89	1,961
Valid N	<i>C</i> 4				
(listwise)	64				

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa pada variabel Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa dengan jumlah data (N) sebanyak 64 responde dalam penelitian ini. Variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 45 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 3,497 dan memiliki nilai mean sebesar 39,73 yang mendekati nilai maksimum 45 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kompetensi aparatur desa adalah tinggi.

Variabel komitmen organisasi memiliki nilai minimum sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 2,544 dan memiliki nilai mean sebesar 32,06 yang mendekati nilai maksimum 35 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata komitmen organisasi adalah tinggi.

Variabel penerapan sistem keuangan desa memiliki nilai minimum sebesar 40 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 2,528 dan memiliki nilai mean sebesar 46,92 yang mendekati nilai maksimum 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penerapan sistem keuangan desa adalah tinggi.

Variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 37 dan nilai maksimum sebesar 45 dengan standar deviasi yang diperoleh sebesar 1,961 dan memiliki nilai mean sebesar 42,89 yang mendekati nilai maksimum 45 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penerapan sistem keuangan desa adalah tinggi.

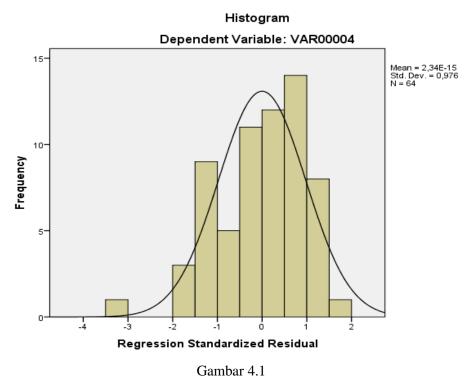
Semakin tinggi tingkat standar devisiasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner semakin bervariasi. Sedangkan semakin rendah tingkat devisiasinya maka jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin homogen yang berarti bahwa variasi jawaban semakin kecil. Dalam penelitian ini standar devisiasi untuk masing-masing variabel adalah kompetensi aparatur desa sebesar 3,497, komitmen organisasi sebesar 2,544, penerapan sistem keuangan desa sebesar 2,528 dan

akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 1,961. Hal ini menjelaskan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner tidak terlalu bervariasi, rata-rata responden mengisi lembaran jawaban kuesioner pada skala 4 dan 5 sehingga dapat dikatakan homogen.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah data penelitian terdistribusikan dengan secara normal atau tidak. Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji dengan melihat grafik probability plot of regression standardlized residual sebagai berikut:



Grafik Histogram

Berdasarkan pada gambar 4.1, residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Maka dari itu dalam hal ini dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Dependent Variable: VAR00004

1,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Observed Cum Prob

Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot

Dari gambar grafik 4.2 dapat dilihat bahwa grafik P-P Plot diatas sebaran data memusat pada garis rata-rata dan median atau nilai P-P Plot *Regression standardlized* terletak di garis diagonal/mengikuti garis diagonal, maka dari itu dapat dikatakan bahwa data penelitian memiliki penyebaran atau terdistribusi normal. Dengan melihat grafik histogram dan P-Plot maka dapat dikatakan data penelitian adalah normal dan penelitian tersebut dapat diteruskan.

4.3.2.2 Uji Multikolonearitas

Uji ini digunakan untuk melihat variabel-variabel independen tidak memiliki korelasi dengan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan

dengan menggunakan Varians Inflarion Faktor (VIP) dan tolerance. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a

	Collinearit	y Statistics
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KAD (X1)	,949	1,054
KO (X2)	,942	1,061
P.SKD (X3)	,991	1,009

a. Dependent Variable: APDD (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

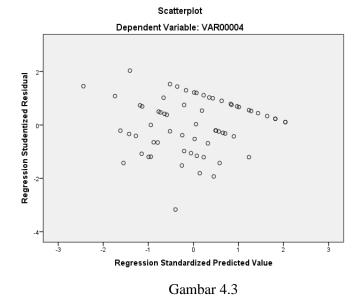
Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa memiliki nilai tolerance yang dimana masing-masing >0,1. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak menunjukkan terjadinya Multikolonearitas. Begitu juga dengan tabel VIF yang menunjukkan bahwa nilai VIF-nya <10, ini juga yang dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang dipakai tidak menunjukkan terjadinya Multikolonearitas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola tertentu teratur,
 maka telah terjadi heterokesdatisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdatisitas



Grafik Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik yang terdapat pada grafik tersebut menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam pengujian.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Kompetensi Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X₂) dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (X₃) secara keseluruhan terhadap variabel terikan yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18 Analisis Regresi Linear Berganda

Standardized **Unstandardized Coefficients** Coefficients Model В Std. Error Beta Sig. ,000 (Constant) 21,195 5,496 3,856 KAD(X1),105 ,065 ,188 1,616 ,111 ,090 2,972 ,004 KO (X2) ,267 ,346 P.SKD (X3) .191 .088 .246 2,164 034

Coefficients^a

Dependent Variable: APDD (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diambil persamaan:

$$Y = 21,195 + 0,105_1 + 0,267_2 + 0,191_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

- Konstanta (α) = 21,195, nilai konstanta bernilai positif artinya jika variabel Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa tidak mengalami perubahan atau = 0, maka akan menaikkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 21,19%
- b. Koefisien Regresi $X_1(\beta_1) = 0{,}105$, menunjukkan Koefisien Regresi variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) artinya apabila variabel independen lain memiliki nilai tetap dan Kompetensi Aparatur Desa mengalami peningkatan

- sebesar 10,5%. Nilai positif pada koefisien menandakan bahwa kompetensi aparatur desa searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Koefisien Regresi X_2 (β_2) = 0,267, menunjukkan Koefisien Regresi Variabel Komitmen Organisasi (X_2) artinya apabila variabel independen lain memiliki nilai tetap dan Komitmen Organisasi mengalami peningkatan sebesar 26,7%. Nilai positif pada koefisien menandakan bahwa komitmen organisasi searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa
- d. Koefisien Regresi X_3 (β_3) = 0,191, menunjukkan Koefisien Regresi variabel Penerapan Sistem Keuangan Desa (X_3) artinya apabila variabel independen lain memiliki nilai tetap dan Penerapan Sistem Keuangan Desa mengalami peningkatan sebesar 19,1%. Nilai positif pada koefisien menandakan bahwa penerapan sistem keuangan desa searah dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial (Uji Statiska T) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu varibel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% dengan satu arah (0,05).

Nilai T_{tabel} untuk n = 64-3-1 = 2,000, dimana n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel independen.

Tabel 4.19
Hasil Uji T
Coefficients^a

		Unstandardize	d Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	21,195	5,496		3,856	,000
	KAD (X1)	,105	,065	,188	1,616	,111
	KO (X2)	,267	,090	,346	2,972	,004
	P.SKD (X3)	,191	,088	,246	2,164	,034

a. Dependent Variable: APDD (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 22 Tahun 2021

- a. Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan tabel 4.13 *output coefficients*, variabel motivasi diketahui T_{hitung} sebesar 1,616 dimana T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 2,000 atau sebesar 2,284 < 2,000. Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,111 dimana dalam hal ini nilai sig. lebih besar dari 0,05 atau 0,111 > 0,05 maka hal ini menjelaskan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- b. Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan tabel 4.13 *output coefficients*, variabel motivasi diketahui Thitung sebesar 2,972 dimana Thitung lebih besar dari Ttabel sebesar 2,000 atau sebesar 2,972 > 2,000. Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,004 dimana dalam hal ini nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau 0,004 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- c. Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan tabel 4.13 *output coefficients*, variabel motivasi diketahui T_{hitung} sebesar 2,164 dimana T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,000 atau sebesar 2,233 > 2,000. Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,034 dimana dalam hal ini nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau 0,034 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Penerapan Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau variabel terikat.

Tabel 4.20 Hasil Uji F

\mathbf{A}	N(ď	V A	۱a

Mod	lel	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56,110	3	18,703	6,029	,001 ^b
	Residual	186,124	60	3,102		
	Total	242,234	63			

a. Dependent Variable: APDD (Y)

b. Predictors: (Constant), P.SKD (X3), KO (X2), KAD (X1)

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,029 dengan nilai F_{tabel} yaitu 2,76 dimana nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu 6,029. Selain itu juga dapat dilihat bahwa nilai sig. sebesar 0,001 dimana nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau 0,001 < 0,05, maka dalam hal ini Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Kompetensi Aparatur Desa (X_1) , Komitmen Organisasi (X_2) dan Penerapan Sistem Keuangan Desa secara

(X₃) simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

4.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar peran variabel bebas (Independen) yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikan (Dependen). Dibawah ini adalah hasil uji koefisien determinasi dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

			Adjusted R	Std. Error of	
Model	R	R Square	Square	the Estimate	Durbin-Watson
1	,481ª	,232	,193	1,76127	1,701

a. Predictors: (Constant), P.SKD (X3), KO (X2), KAD (X3)

b. Dependent Variable: APDD (Y)

Sumber: Data diolah SPSS 22 tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,193 atau 19,3%. Hal ini dapat mengidentifikasikan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Penerapan Sistem Keuangan (X3) mempengaruhi variabel Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 19,3% sesangkan sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.12 *Output Coefficient*, variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki t hitung sebesar 1,616 dan signifikan sebesar 0,111. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (1,616 < 2,000) maka Ho diterima dan Ha diterima. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari α (0,111 < 0,05) yang dapat diartikan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X1) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Karena kompeten atau tidaknya aparatur desa tidak akan memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sari, 2021).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi, pengetahuan yang kurang baik dalam menjalankan sistem mengenai pengelolaan dana desa dan masih minimnya pemahaman teknis yang akuntansi yang baik sehingga menyusun dan melaporkan realisasi anggaran dana desa masih kurang optimal. Tidak terlaksanaya kegiatan pelatihan juga menjadi alasan kompetensi aparatur desa menjadi kurang maksimal. Kompetensi aparatur desa tergolong masih lemah ketika harus mengelola dana desa yang cukup besar, oleh sebab itu pada pemerintah desa sudah terdapat sistem yang dapat memudahkan seseorang membuat laporan menjadi akuntabel tanpa harus mempertimbangkan tingkat kompetensi (Widyatama et al., 2020).

Kompetensi aparatur desa yang maksimal di desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kurang memadainya kompetensi aparatur desa ini tidak membantu perangkat desa untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama, 2017) dan (Nurkhasanah, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.12 *Output Coefficient*, variabel Komitmen Organisasi memiliki t hitung sebesar 2,972 dan signifikan sebesar 0,004. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,972 > 2,000) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari α (0,004 < 0,05) yang dapat diartikan bahwa Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel (Mada *et al.*, 2017). Semakin baik komitmen organisasi maka akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan (Gamaliel, 2017).

Seseorang yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan komitmen yang tinggi nantinya akan mempermudah dalam menerapkan prinsip

akuntabilitas di dalam mengelola keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa diperlukanya kesiapan dari aparatur desa yang nantinya dapat mendorong dan melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan yang dilaksanakan aparatur desa merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam upaya pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi tinggi yang dimiliki aparat desa akan mepermudah aparat desa dalam menemukan solusi dari setiap kendala yang terjadi terkait dengan pengelolaan dana desa, dikarenakan apa yang tengah terjadi pada desa aparatur desa merasa masalah tersebut juga menjadi tanggung jawabnya, sehingga kendala tersebut akan mudah terselesaikan. Komitmen organisasi yang tinggi juga akan membuat aparatur desa memiliki inisiatif dalam bekerja sehingga tidak perlu menunggu perintah dari pihak tertentu serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang telah diamanahkan kepadanya, hingga tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dapat terealisasi dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Medianti, 2018) dan (Mada et al., 2017) yang menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel 4.12 *Output Coefficient*, variabel Penerapan Sistem Keuangan Desa memiliki t hitung sebesar 2,164 dan signifikan sebesar 0,034. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,164 > 2,000) maka

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari α (0,034 < 0,05) yang dapat diartikan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) berpengaruh parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa dan berkonsep akuntabilitas yaitu dapat mempertanggung jawabkan kemana uang atau dana desa tersebut digunakan. Penerapan sistem keuangan desa dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa (Rivan et al., 2019). Penerapan aplikasi sistem keuangan desa dapat memudahkan aparatur desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen seperti halnya dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran (SPP), surat setoran pajak (SSP) dokumen-dokumen diperlukan dan lain yang dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan pastinya laporan tersebut nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Selain penggunaan sistem keuangan dapat memberikan kemudahan dalam penatausahaan, dengan sistem keuangan yang baik ini nantinya dapat mencegah terhadap potensi penyimpangan. Semakin baik penggunaan sistem keuangan maka akan semakin baik pula pencapaian akuntabilitasnya (Arfiansyah, 2020). Jika sistem dapat digunakan dengan baik maka hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan terbantu saat bekerja dan cenderung menggunakan sistem

tersebut secara terus menerus (Harjito, 2020). Sistem keuangan yang baik memudahkan penggunaan dan kebermanfaatannya akan berdampak pada tingginya pencapaian atas akuntabilitas yang tercermin pada aspek kejujuran, ketaatan perundang-undangan dan proses pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Julianto & Dewi, 2019) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji simultan dari tabel F hitung sebesar dari F tabel (df1=3, df2=61, α=0,05) sebesar 2,76 atau 10, > 2,76, diketahui nilai sig. sebesar 0,001 dimana nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau 0,001 < 0,05 dan diperoleh hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,193 atau 19,3% serta sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Kompetensi Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Julianto, 2019) yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

adanya kompetensi aparatur desa yang baik meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa serta mampu menerapkannya dengan baik pula, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Apalagi jika dalam hal ini diikuti dengan adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa, aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan semakin dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan dalam sehingga akan organisasi juga mencapai keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara akuntabel. Aparatur desa dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa juga harus didukung dengan adanya peningkatan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi siskeudes diterapkan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga nantinya memudahkan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai variabel kompetensi aparatur desa, komitemen organisasi dan penerapan sistem keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tidak terdapat pengaruh parsial dan signifikan variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan
- b. Terdapat pengaruh parsial dan signifikan variabel Komitmen Organisasi
 (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa
 yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan
- c. Terdapat pengaruh parsial dan signifikan variabel Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan
- d. Terdapat pengaruh Aparatur Desa (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Penerapan Sistem Keuangan Desa (X3) secara bersama-sama dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desadesa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

a. Bagi Desa

Aparatur desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan diharapkan agar lebih terampil dan cekatan dalam mengelola keuangan desa serta pendamping desa diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dalam mengelola dana desa akan semakin optimal dan menunjukan keberhasilan yang maksimal seperti lebih giat lagi dalam mengikuti seminar atau bimbingan teknologi yang dilakukan setiap tahun oleh pihak-pihak terkait mengenai tahap penyusunan data, perencanaan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan guna tidak terjadi penyelewengan dan korupsi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Jika tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan/menambahkan variabel lain yang akan diteliti sebagai variabel pendukung yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan juga menambah indikator maupun daftar pertanyaan yang akan digunakan agar hasil penelitian yang diperoleh akan semakin baik serta diharapkan pula dapat memperluas responden dan ruang lingkup penelitian agar lebih dapat digeneralisasikan

5.3 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam hal ini adalah:

- a. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya
 Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Keuangan
 Desa. Sedangkan masih banyak terdapat faktor-faktor lain yang dapat
 mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Penelitian ini hanya meneliti pada subjek perangkat desa yang ada pada
 Kecamatan Percut Sei Tuan

DAFTAR PUSTAKA

- 2017, T. (2017). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kclapa Kabupaten Banyuasin Analists Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Bul.
- Alpendra, E., Sosial, F. I., Islam, U., Singingi, K., Nenas, K., Kuantan, T., & Singingi, K. K. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa kopah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. 466–480.
- April, P., Akuntansi, J. R., Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 467–480. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886
- Ardianti 1, P. A. R., Bisnis, F. E. dan, & Universitas Udayana, I. (2017). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 1041–1054.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terha- dap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, *3*(1), 67–82. http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa/article/view/2369
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240
- Fauzi, F., & Siregar, M. H. (2019). Pengaruh Kompetensi Dan Kinerja Karywan Terhadap Pengembangan Karir di Perusahaan (Studi Kasus di PT WB, Tbk Wilayah Penjualan III Jakarta). *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 14(2), 9–21. https://doi.org/10.37301/jmubh.v14i2.14810
- http://etheses.uin-malang.ac.id/2358/7/09510126_Bab_3.pdf. (2014). Teknik Pengumpulan Data. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2358/7/09510126_Bab_3.Pdf.
- Izzah, D., Taufeni Taufik, & Vera Oktari. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 12–28. https://doi.org/10.31258/jc.2.1.12-28
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana

- Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242
- Kurnianto, S., Kurniawansyah, D., & Ekasari, W. F. (2019). Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 687–706. https://doi.org/10.31093/jraba.v4i2.177
- Lembaran, T., & Republik, N. (2014). www.bphn.go.id.
- Lestari, P. I., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh komitmen organisasi, pengawasan, dan ketepatan waktu terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada penyelenggara pemerintahan desa. *JIMAT* (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*) *Undiksha*, 8(2).
- Lubis, A., Sari, E. N., & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- M. Titan Terzaghi, Poppy Infdriani, H. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. 17, 45–54.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill*," 8(2), 106–115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8*(1). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering, 1*(1), 118–130.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014. (2014). Metode Penelitian. *Paper Knowledge*. *Toward a Media History of Documents*, 36–46.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Komitmen Manajemen Terhadap

- Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ben. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 4(1).
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Pemodesari (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat). *Jom Feb*, *1*(Dd).
- Muhammad Arif, M. (2018). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram. 1–83.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Metode penelitian*. 65–80.
- Nugroho, W. A. (2018). Hubungan Antara Self-Efficacy Dengan Komitmen Kerja Karyawan Outsourcing Di CV.X. *Eprints.Mercubuana-Yogya.Ac.Id*, 15–37. eprints.mercubuana-yogya.ac.id
- Nurcahyo, B., & Riskayanto, R. (2018). Analisis Dampak Penciptaan Brand Image Dan Aktifitas Word of Mouth (Wom) Pada Penguatan Keputusan Pembelian Produk Fashion. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, *3*(1), 14. https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i1.12026
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono 2018:8 metode kuantitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purnama, D., & Azizah, S. N. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa Berbasis Akuntansi Keperilakuan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *3*(2), 160. https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2606
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
- Rafsanjani, N., & Cheisviyanny, C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(1), 12–31. https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.354
- Riana, D., Tetap, D., Fakultas, Y., Program, E., & Palembang, U. T. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Divisi TI Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. 521–528.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179. https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843
- Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas

- Pendapatan dan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintahan Berbasis Akrual dilakukan dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akrual dan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1357–1368.
- Trisnadewi, E., Amlayasa, B., & Rupa, I. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siskeudes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, 10(1), 37–52.
- Wibowo, H. T. (2020a). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2(2).
- Wibowo, H. T. (2020b). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta. 2(2).
- Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. *E-Jurnal Akuntansi*, 69. http://eprintslib.ummgl.ac.id/642/1/15.0102.0070_BAB I_BAB III_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf
- Zoraya, 2020. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Anggaran Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981

LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2024/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2021

Kepada Yth. Medan, 8/2/2021

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

: Suci Utami NPM : 1705170302 Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

: 1. Terdapat keterlambatan dalam penyerahan laporan anggaran dana desa di desa laut Identifikasi Masalah

dendang kecamatan percut sei tuan 2. Masih tidak adanya pengungkapan mengenai informasi dana desa di kecamatan percut sei

tuan

3. Masih rendahnya komitmen organisasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja dalam kinerja organisasi publik PT. PLN (Persero) Medan

Rencana Judul : 1. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Transparansi pengelolaan dana desa

Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja

Organisasi Publik

Objek/Lokasi Penelitian : 1. Desa Laut Dendang, kec. Percut Sei Tuan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya Pemohon

Shimish (Suci Utami)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2024/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2021

Nama Mahasiswa	: Suci Utami
NPM	1705170302
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	: 8/2/2021
Nama Dosen pembimbing*)	:H. Ihsan Rambe, SE., M.Si (25 Februari 2021)
Judul Disetujui**)	Analisis Determinan A Euntabilitas Pengelolaa Dana Desa pada Fecamatan Percut sei Tuan
Disahkan oleh: Ketua Program Studi Akuntansi	Dosen Pembimbing
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)	Mran Raule



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474 Website: http://www.umsu.ac.id Email: rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR: 986/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan

Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi Pada Tanggal : 04 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

 Nama
 : Suci Utami

 N P M
 : 1705170302

 Semester
 : VIII (Delapan)

 Program Studi
 : Akuntansi

Judul Proposal / Skripsi : Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada

Kecamatan Percut Sei Tuan

Dosen Pembimbing : H. Ihsan Rambe, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

 Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

 Pelakasanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

 Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan "BATAL" bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal: 20 April 2022

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 Ramadhan 1442 H

Dekan

20 April 2021 M

, SE., MM., M.Si

Tembusan:

1. Pertinggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,		I	ł
	20		1

Kepada Yth,	
Ketua/Sekretaris Prog	gram Studi
Fakultas Ekonomi dai	n Bisnis UMSU
Di	

الماكات

Medan

100	200	100	10	_																
Assalamu'alaikum V	Vr.	Wb.																		
Saya yang bertanda	tan	gan	di ba	wah	ini:															
Nama Lengkap	:						_		_		_	_	_	_	_	_	_	_		_
- min Lenguap		5	и	С	1		ц	Т	A	M	1									L
	10																			
NPM	:	1	7	0	5	1	7	0	3	0	2									
																			7	
Tempat.Tgl. Lahir	:	м	E	D	٨	7		1	3		J	ш	2	t		1	9	9	8	
Program Studi	:	Ak	unta	ınsi /																
		Ma	maje	men																
Alamat Mahasiswa	:	J	L		M	A	7	G	A	A	7		3		7	0		0	8	

t Penelitian	:	k	٨	7	т	0	R		K	e	c	A	м	A	٦	Α	н		
		P	E	R	С	u	т		5	E	1		т	u	A	7			
		k	A	В		D	E	L	1		5	E	R	0	A	N	C		

Alamat Penelitian	:	J	L		В	E	3	A	R		Т	E	M	В	ц	N	C		N	0	
		2	2		P	É	R	c	u	т		5	Ε	1		т	u	A	N		
		k	A	6		D	E	L	t		5	E	R	D	A	N	c				

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian. Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara

Tempat

2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui Ketua/Sekretaris Program	n Studi
6	
(Filriani Saragih si	si

Wassalam Pemohon

(Suci nami



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474 Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 984/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Medan, 08 Ramadhan 1442 H

20 April 2021

M

Perihal : Izin Riset

Kepada Yth.

Lampiran

Bapak/Ibu Pimpinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Deli Serdang

Jln. Karya Dharma No.2, Perbarakan, Kec. Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Suci Utami Npm : 1705170302 Program Studi : Akuntansi Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi : Analisis Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan

Percut Sei Tuan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan : 1. Pertinggal



Nomor

Sifat

Lamp.

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Alamat : Jl. Besar Tembung No. 22 Kode Pos – 20371 Telp. (061) 738008 Email. Kecpercutseituan@deliserdangkab.go.id

Tembung, 02 Juni 2021

Kepada Yth,

Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 070/1169/BPDS/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Perihal Izin Riset dilaksanakan oleh :

a. Nama

: 070/1190

: Suci Utami

b. Alamat

: Jl. Mangaan III No.8 Lk.IX Desa/Kel. Mahar Kec. Medan Deli

c. NIM/NIP/KTP

: Melaksanakan Rekomendasi / Izin Riset

: 1271065306980001

d. Pekerjaan

: Mahasiswa

e. Jurusan

: Akuntansi

f. Judul

: Analisa Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

g. Daerah/Lokasi

: Desa se - Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

h. Lama Penelitian

: 2 (dua) bulan

i. Peserta

: Sendiri

b. Penanggung Jawab

: H. Januari, SE ,MM ,M.Si

Bahwa ini disampaikan yang bersangkutan akan melaksanakan Riset Desa – se Kecamatan Percut Sei Tuan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT PERCUT SEI TUAN

ISMAIL, SSTP, MSP

PEMBINA TK.I

NIP.198009042000121003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2563/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Medan, 07 Robi'ul Awwal 1443 H

Lamp. : -

14 Oktober 2021 M

Hal : Menvelesaikan Riset

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan

Jln. Besar Tembung No. 22 Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang

Di-Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu** (**S1**) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Suci Utami N P M : 1705170302 Semester : IX (Sembilan) Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada Desa-Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



C.c.File

Dekan
H. Jamirt, SE., MM., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG **KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Alamat : Jl. Besar Tembung No. 22 Kode Pos - 20371 Telp. (061) 738008 Email. Kecpercutseituan@deliserdangkab.go.id

Percut Sei Tuan, 69 September 2021

Nomor

:070/2504

Lampiran

Perihal

: SELESAI RISET.

Kepada Yth:

Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

Tempat

Sehubungan dengan Surat Izin Penelitian/ Riset yang di laksanakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan, yang dilaksanakan oleh:

a. Nama

: Suci Utami

b. NIM/NIK

: 1271065306980001

c. Alamat

: Jl. Manggaan III No. 8 Lk IX Kel. Mabar Medan Deli

d. Pekerjaan

: Mahasiswa

e. Jurusan

: Akuntansi

f. Daerah Penelitian : Desa se-Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

g. Lama Penelitian : 2 (Dua) Bulan

h. Peserta

: Sendiri

Penanggung Jawab: H. Januari, S.F., MM., M.Si

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

SAH RAD

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

SERDE

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

CAMAT PERCUT SEI TUAN

Pembina Tk. I

NIP. 198009042000121003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Suci Utami

NPM : 1705170302

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 Juni 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Mangaan III No. 08 Mabar

Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

No. Telepon : 0821-6474-5432

Email : suciutami1398@gmail.com

2. Data Orangtua

Nama Ayah : Sudarto

Pekerjaan : Swasta

Nama Ibu : Titin Sari Maya

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mangaan III No. 08 Mabar

3. Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDS Tut Wuri Handayani

Sekolah Menengah Pertama : SMPN 33 Medan

Sekolah Menengah Atas : SMPN 7 Medan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara